

PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014)

Oleh : Algi Fajri
Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pulau Terap Village one of the villages located in the district of Kuok is a village that is still strong customs, religious and agrarian. The role of the informal leaders seemed so real in building public awareness in development, this is because the villagers Pulau Terap comes from the same tribe or homogeneous so that the role of informal leaders are needed to strengthen unity in the community. The formulation of the problem in this study how informal leadership roles in the development in the Pulau Terap village of Kuok District of Kampar Regency. This study aims to identify and explain the role of the Informal Leaders in Development in Pulau Terap Village istrict of Kuok. This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.

Based on this research, seen the role of informal leaders in rural development is very important amongst the people but not very effective in terms of informing and inviting the public to participate in development activities. In addition informal leaders often become donors in every building in the village. To increase the participation of community development need their leaders sinerginitas between formal and informal leaders,

Keywords: *Informal Leader, Development, Village*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemimpin informal memiliki kedudukan yang cukup tinggi di masyarakatnya mengingat mereka adalah orang-orang yang dipandang memiliki kapasitas atau keunggulan tertentu dibanding dengan warga masyarakat lainnya. Keberadaan pemimpin informal menjadi pintu masuk berbagai pengaruh positif maupun negative yang berasal dari lingkungan luar masyarakatnya. Dengan kata lain, pemimpin informal merupakan individu-individu yang berfungsi sebagai saluran dan agent pengembangan masyarakat.

Pemimpin informal dapat dipahami sebagai seseorang yang dalam penentuan dirinya menjadi seorang pemimpin dikarenakan kepemilikan faktor-faktor atau sifat-sifat (*traits*) tertentu yang terdapat dalam pribadinya. Karakteristik dimaksud mencakup kepemilikan intelegensi yang tinggi, kepercayaan pada diri sendiri yang baik, keinginan dan kemampuan untuk bertindak lebih maju atau berprestasi, dapat dipercaya dan

memiliki kejujuran, dan menyenangkan dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya (Northouse, 2007:19).

Dalam konteks pembangunan, pemimpin informal menjadi kelompok strategis dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan kepada masyarakatnya, yaitu pembaharuan menuju masyarakat demokratis dan harmonis. Oleh karena itu, seorang pemimpin informal perlu menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin dan berpedoman pada hasil kinerja unggul.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perkataan pemimpin atau *leader* memiliki berbagai pengertian.

Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi. Fairchild dalam Kartono (2009: 38-39)

menyatakan bahwa pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha/upaya orang lain, melalui prestise, kekuasaan atau posisi, sedangkan pemimpin dalam arti terbatas ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara perangkat/pemerintah desa dengan masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pengawasan. Suatu program tidak akan berjalan maksimal bila tidak adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu kerjasama yang pantas untuk dilaksanakan adalah dengan melakukan perencanaan bersama.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa di dalam organisasi tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok lain. Dalam hal ini pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa merupakan organisasi formal, organisasi formal yang tumbuh bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok sosial yang disebut dengan organisasi informal.

Peran pemimpin informal sangat penting dalam pembangunan desa, pemimpin informal merupakan tokoh sentral dalam pembangunan selain dari pemimpin formal seperti kepala desa. Pemimpin informal juga membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dan sukarela untuk turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan fisik, mental dan sebagainya.

Pemimpin informal secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap anggota masyarakat yang ada di desa. Hal tersebut disebabkan karena mereka mempunyai massa atau anggota di desa dan biasanya anggota tersebut tunduk kepada mereka.

Menurut **Cohen dan Uphoff (1977)**, yang diacu dalam **Harahap (2001)**, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam diri maupun

dari luar masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan tidak semuanya bisa dilakukan oleh kepala desa. Diperlukan sinergi dan peran dari masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tua-tua kampung. Karena mereka ini merupakan peran pemimpin informal/non formal dalam masyarakat (Anonim, 2006), pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu.

Dia memperoleh kekuasaan/wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Apabila pemimpin formal dapat memperoleh pengaruhnya melalui prestasi, maka pemimpin informal memperoleh pengaruh berdasarkan ikatan-ikatan psikologis. Tidak ada ukuran obyektif tentang bagaimana seorang pemimpin informal dijadikan pemimpin. Dasarnya hanyalah oleh karena dia pernah benar dalam hal tertentu, maka besar kemungkinan dia akan benar pula dalam hal tersebut pada kesempatan lain. Di samping penentuan keberhasilan pada masa lalu, pemilihan pemimpin informal juga ditentukan oleh perasaan simpati dan antipati seseorang atau kelompok terhadapnya.

Pemimpin informal secara legalitas/sah bukan pemimpin dalam pemerintahan, tapi pemimpin informal merupakan bagian dari masyarakat desa yang perannya sangat penting dalam memberikan pengaruhnya kepada warga masyarakat desa.

Seperti yang dikatakan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Marwan Djafar "Peran kiai kampung (tokoh agama) sangat dibutuhkan untuk turut serta mendorong kebijakan terkait pembangunan desa agar bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa" (dalam Tribunews.com, Palembang 29 Maret 2015).

Lebih lanjut dikatakannya bahwa pemimpin informal sebagai tokoh masyarakat dan panutan masyarakat mempunyai peran nyata dalam membantu program pembangunan desa yaitu dengan memberikan landasan keagamaan bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu ibadah, tokoh agama juga bisa mengajak masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam pembangunan desa, pemimpin informal bisa berperan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan tentang desa.

Desa Pulau Terap salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar merupakan suatu desa yang masih kuat adat istiadat, religius dan agraris. Peran pemimpin informal terasa begitu nyata dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pembangunan, hal ini dikarenakan penduduk Desa Pulau Terap berasal dari suku yang sama atau homogen sehingga peran pemimpin informal sangat dibutuhkan untuk memperkuat persatuan di masyarakat.

Gambaran pembangunan fisik yang ada di Desa Pulau Terap hanya sebatas pembangunan umum seperti jalan, drainase, gedung kantor desa, halaman masjid. Sedangkan pembangunan non fisik hanya berupa bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pembangunan ini memperlihatkan pembangunan fisik belum mengarah kepada kebutuhan hidup bermasyarakat seperti pembangunan sarana prasarana adat, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan prasurvey dilapangan, ternyata peran informasional, peran komunikasi dan peran mempengaruhi dari pemimpin informal tidak nampak. Hal ini disebabkan karena pemimpin formal kepala desa tidak terlalu memberdayakan peran dari pimpinan-pimpinan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dll.

Tabel 1.1: Pembangunan Fisik Berasal Dari Pemimpin Informal Tahun 2013/2014

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Jumlah
1	Pembangunan Teras Masjid	Infak dan Sumbangan Masyarakat	Rp. 26.700.000,-
2	Semenisasi Lapangan Bolavoli	Swadaya dan Sumbangan Masyarakat	Rp. 9.260.000,-
3	Rehabilitasi Posyandu	Swadaya dan Sumbangan Masyarakat	Rp. 2.315.000,-
4	Perbaikan Pos Keamanan	Swadaya dan Sumbangan Masyarakat	Rp. 2.100.000,-

Sumber: Olahan Lapangan.

Berdasarkan data di atas, tergambar jelas bagaimana pembangunan di Desa Pulau terap yang dimotori oleh pemimpin informal sangat terbatas dan sedikit. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara pemimpin informal dengan pemerintah desa dan rendahnya dukungan dana dari masyarakat dalam pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan pemimpin informal memang telah melibatkan seluruh elemen

masyarakat baik dalam pengumpulan dana pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan (gotong royong).

Hampir seluruh dana yang digunakan dalam pembangunan di Desa yang berasal dari pemimpin informal sumber dana terbesar berasal dari pemimpin informal dan pemimpin informal juga mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan desa seperti mengerahkan mobil dumb truk untuk mengangkut pasir dan kerikil agar lebih memperkecil biaya pembangunan dan sumber daya lainnya.

Tabel 1.2: Pelaksanaan Pembangunan Fisik Program Dana Pembangunan Infrastruktur Desa (DPID) Tahun 2014

No	Jenis Pembangunan	Jumlah	Volume
1	Pembukaan badan jalan	Rp. 51.000.000,-	2.000 Meter
2	Semenisasi Halaman Masjid	Rp. 31.500.000,-	42 Meter
3	Pembuatan Drainase	Rp. 30.500.000,-	0,60 x 0,70 x 100 Meter
4	Pembuatan Drainase	Rp. 30.500.000,-	0,60 x 0,70 x 100 Meter
5	Pemasangan Papanisasi	Rp. 45.000.000,-	204 Meter

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Terap.

Data yang terpapar pada tabel di atas, memperlihatkan jenis pembangunan di desa yang berasal dari dana pembangunan infrastruktur desa (DPIP) tahun 2014 yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar tahun 2014. Dimana pembangunan yang dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yakni pembangunan drainase yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak, dikarenakan disaat musim penghujan drainase tersebut tidak berfungsi dengan baik malahan menjadi sumber permasalahan baru dalam mengalirkan air ke anak sungai yang menyebabkan terjadinya genangan di pemukiman masyarakat. Selain itu, pembangunan di desa kurang terkomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Adapun program pembangunan fisik dan non fisik desa Pulau Terap Kecamatan Kuok yang didasarkan dari APBDes tahun 2013 dan 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.3: Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Pulau Terap Tahun 2013-2014

No	Kegiatan	Tahun		Ket
		2013	2014	
1	Rehabilitasi kantor desa	Rp.22.931.000,-	Rp.29.856.574,-	1 unit
2	Pembuatan drainase	Rp.57.000.000,-		1 unit
3	Pembukaan badan jalan	Rp.80.000.000,-		6 x 1500 m
4	Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan	Rp.18.100.000,-	Rp.18.100.000,-	

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Terap.

Kurang baiknya hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah desa di karenakan pada perencanaan pemerintah desa, pemerintah desa lebih mengutamakan program prioritas sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa tanpa melihat tingkat kebutuhan atau manfaat pembangunan untu masyarakat desa. Dimana pada saat penyusunan program pembangunan yang hadir hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pegawai Desa, Kepala Dusun, dan hanya sebagian anggota BPD, serta beberapa orang tokoh masyarakat. Kemudian perencanaan pembangunan di sahkan secara bersama-sama akan tetapi tidak memberi dampak yang lebih baik dari pembangunan tersebut.

Tabel 1.4 : Keadaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pulau Terap Tahun 2015

No	Lembaga/Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Karang Taruna	1
2.	Kelompok Tani	2
3.	Lembaga Adat	1
4.	Organisasi Keagamaan	4
5.	Masjid	4
6.	Surau	1
7.	Posyandu	3
8.	Sarana Olahraga (Sepakbola, Bulutangkis, Tenis Meja, Voli, Pusat Kebugaran)	10

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Terap.

Data di atas, terlihat jelas bahwa keadaan lembaga dan fasilitas umum yang ada di Desa Pulau Terap cukup memadai, akan tetapi khususnya pada lembaga-lembaga hanya lembaga adat yang memiliki kantor/sekretariat sendiri. Hal ini memperlihatkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pulau

Terap khusus dalam membangun tempat/wadah masyarakat.

Pembangunan yang bersifat keagamaan, sosial, budaya, dan kepemudaan sangat penting untuk setiap daerah. Salah satunya di Desa Pulau Terap yang mana pembangunan ini lebih banyak dilakukan oleh pemimpin informal dalam menggalang pembangunan seperti masjid dan lapangan olahraga.

Adapun pembangunan non fisik yang dilaksanakan pemimpin informal yakni sebagai berikut:

Tabel 1.5: Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Desa Pulau Terap

No	Kegiatan	Ketua	Sumber Dana
1.	Wirid Pengajian	Hj. Saroma	Iuran dan swadaya
2.	Peraturan adat	Dt. Sulaiman	Iuran dan swadaya
3.	Pengajian/pendalaman Agama	Ishak	Iuran dan swadaya
4.	Kegiatan olahraga sepak bola, bolavoli, sepak takraw	Herizal	Iuran dan swadaya

Pembangunan non fisik yang ada di Desa Pulau Terap sangat bergantung kepada pemimpin informal dalam membina, mensosialisasikan dan membangun kegiatan yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat.

Adapun identifikasi masalah yang ditemui berdasarkan hasil observasi lapangan, yakni:

1. Tidak adanya sinergitas antara pemerintah desa dan tokoh-tokoh informal membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang maksimal.
2. Perencanaan pembangunan di desa kurang melibatkan pemimpin informal. Hal ini terbukti dari setiap rapat musrenbangdes yang diundang Kepala Desa hanya ketua RT/RW, LPM, Karang Taruna, sedangkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama tidak pernah diundang untuk ikut dalam musrenbangdes, sehingga tidak ada program pembangunan yang berasal dari tokoh informal masuk dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun usulan tokoh informal yang disampaikan melalui BPD yakni 1) usulan dari tokoh agama berupa pembangunan tempat parkir kendaraan di masjid dan musholla, 2) usulan dari tokoh adat yakni pembangunan balai adat dan pembangunan non fisik berupa bantuan pembuatan peraturan adat Desa Pulau Terap. Sedangkan usulan yang berasal dari tokoh pemuda berupa pembangunan sarana olahraga. Namun sampai saat ini belum ada

yang terlaksana yang bersumber dari usulan tokoh informal.

3. Banyak pembangunan di desa yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
4. Pemimpin informal hanya terlibat dalam pembangunan agama, sosial, dan kepemudaan.

Berdasarkan pendapat di atas, adanya ketidakpaduan atau tidak adanya sinergitas antara pemerintah desa dan tokoh-tokoh informal membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang maksimal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul proposal **“Peranan Pemimpin Informal dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2014)”**.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Peranan Pemimpin Informal dalam Pembangunan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Pemimpin Informal dalam Pembangunan di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan terhadap pemimpin informal dalam pembangunan di Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- c. Sebagai bahan informasi dan kajian secara ilmiah bagi kita semua.

Tinjauan Pustaka Pemimpin Informal

Pemimpin informal menurut **Kartono (2009:10-11)** adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin. Namun, karena pemimpin informal memiliki sejumlah kualitas unggul, pemimpin informal mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. ia menambahkan ciri pemimpin informal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki penunjukkan formal atau legitimitas sebagai pemimpin.
- 2) Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
- 3) Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
- 4) Biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
- 5) Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
- 6) Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum; hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.

Elit

Menurut **Suzanne Keller (1995:3)** Istilah *elit* disini pertama-tama menunjukkan kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit yang mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial.

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Seperti dalam masyarakat terdapat stratifikasi dari segi kekuasaan yang dimiliki yang memiliki kekuasaan disebut *elit* (pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan arena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat. Stratifikasi kekuasaan ini dapat ditemui dalam masyarakat macam apapun.

Harold D. Laswell (2006: 239-240) mendefinisikan elite sebagai individu-individu yang berhasil memiliki bagian terbanyak dari nilai-nilai (*values*) dikarenakan kecakapannya, serta sifat-sifat kepribadian mereka; dan karena kelebihan tersebut maka mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Wright Mills, elite adalah individu-individu yang

menduduki posisi puncak dalam institusi ekonomi, politik dan militer.

Pembangunan Desa

Menurut **A. Suadji (1999:15)**

Pembangunan desa yaitu dimana suatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan sesuai keinginan mereka, A. Suradji melanjutkan bahwa potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti : tanah, hutan, sumber air, dan sebagainya, sedangkan potensi manusia berupa penduduk yang besar harus di tingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu mengali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut semaksimal mungkin, sehingga dalam pembangunan desa dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah secara sepihak saja akan tetapi melibatkan masyarakat juga tokoh masyarakat seperti Kepala Adat yang menjadi panutan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sehingga dalam hal ini peran tokoh Adat lah yang sangat penting untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembangunan bertujuan untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakikat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Khairuddin (2002:29) menyatakan pada umumnya, Komponen dari cita-cita akhir dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya "titik jenuh" yang absolute yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti:

- 1) Keadilan sosial
- 2) Kemakmuran yang merata
- 3) Perlakuan sama dimata hukum
- 4) Kebahagiaan mental, spiritual dan material
- 5) Kebahagiaan untuk semua
- 6) Ketentraman dan keamanan

Dengan melihat tujuan-tujuan tersebut diatas, maka nyatalah tidak ada sesungguhnya titik akhir dalam pembangunan.

Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa

Menurut **Karl dan Rosenzweig (2002:431)** Peran berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Peranan

merupakan aspek dinamis didasari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran.

Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Susantyo, 2007:15) mengemukakan peran masyarakat dalam hubungannya dengan proses pembangunan, yaitu :

- a. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lainnya.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan terutama berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

3. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuannya agar data dapat terkumpul.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema penelitian, oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya

terkait dengan tema dan bahasan saja yang perlu disajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Pemimpin Informal Dalam Menentukan Arah, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Desa

1. Ikutserta Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Sementara keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan di Desa Pulau Terap berupa memberikan masukan atau usulan pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat. Adapun jenis usulan pembangunan yang berasal dari pemimpin informasi di Desa Pulau Terap pada tahun 2013-2014 sebagai berikut:

Tabel III.1 : Bentuk Usulan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Fisik dan Non Fisik pada Pemerintah Desa Pulau Terap Tahun 2013-2014

No.	Bentuk Usulan	Keterangan
1	Usulan Pembangunan Fisik 1. Balai-balai adat Desa 2. Pembuatan drainase 3. Semenisasi halaman masjid 4. Tempat parkir masjid 5. Perbaikan posyandu 6. Perbaikan pos keamanan 7. Pembangunan gapura masuk desa	Tidak terealisasi Terealisasi Terealisasi Tidak Terealisasi Tidak Terealisasi Tidak Terealisasi Tidak Terealisasi
2	Usulan Pembangun Non Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Bantuan UKM 2. Bantuan Insentif Penjaga Masjid/Mushola 3. Bantuan Dana Perumusan Peraturan Adat Desa 4. Bantuan Beasiswa kepada siswa kurang mampu yang berprestasi	Tidak Terealisasi Tidak Terealisasi Tidak Terealisasi Tidak Terealisasi

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2016

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat pemimpin informal di Desa Pulau Terap sangat aktif dalam memberikan usulan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Pulau Terap. Namun, dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan dan banyaknya usulan yang menjadi program kerja pemerintah desa, maka tidak seluruh usulan pembangunan yang diajukan pemimpin informal masuk dalam program pembangunan pada tahun berjalan. Dari 11 program pembangunan yang diusulkan pemimpin informal hanya 2 program yang bisa direalisasikan dan diterima oleh pemerintah desa dalam

pembangunan di Desa Pulau Terap. Padahal bila dilihat dari bentuk pembangunan yang diusulkan sangat merakyat dan dibutuhkan masyarakat pada umumnya.

2. Menentukan Arah Dalam Pembangunan

Dilihat dari peran pemimpin dalam memotivasi anggotanya atau masyarakat, dalam hal ini memotivasi diartikan mendorong atau memberi semangat kepada anggota atau bawahannya. Pemberian motivasi dari pemimpin informal kepada masyarakat berupa wejangan-wejangan supaya ikut aktif dalam pembangunan desa karena disaat desa jadi bagus yang senang juga masyarakat. Hal kecil lainnya yang menjadi pendorong masyarakat ikut serta karena pemimpin informal seringkali memberi anggotanya makan sesudah kegiatan dan memberi rokok disaat kegiatan kerja bakti atau pembangunan. Hal itu yang membuat masyarakat semangat berperan dalam kegiatan pembangunan.

Pengaruh pemimpin informal sangat besar dalam pembangunan di Desa Pulau Terap. Dimana terdapat beberapa pembangunan yang dilakukan secara swadaya melibatkan pemimpin informal sebagai motor penggeraknya dalam pengumpulan dana maupun dalam melibatkan menggerakkan masyarakat desa.

3. Ikutserta dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa

Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat sebagai suatu pilihan dalam memecahkan masalah merupakan hal yang perlu dipertahankan karena masyarakat diberi kebebasan untuk memberi ide, gagasan, saran dan usul sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan warga, serta sesuai dengan pendapat J. Supranto, (2005: 9) ada empat kategori keputusan yang ada dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa yaitu:

a. Keputusan dalam keadaan kepastian

Sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan, terlebih dahulu disiapkan materi atau masalah-masalah yang akan dibahas dalam rembug desa. Masalah-masalah atau usulan muncul dari warga masyarakat yang diwakilkan oleh ketua RT atau ketua RW. Setelah itu, usulan tersebut diajukan dan dibahas dalam rapat desa. Ada juga usulan yang berasal dari pemimpin informal yang terlibat langsung dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

b. Keputusan dalam keadaan ada resiko (*risk*)

Setiap keputusan pembangunan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat baik itu secara ekonomi, sosial, dan

budaya. Dimana setiap usulan yang diputuskan bisa saja bertentangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, namun dikarenakan kebutuhan untuk menopang program kerja pemerintah desa sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa maka bisa jadi pembangunan tersebut yang dilaksanakan.

Pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya berdampak baik dimata masyarakat, akan tetapi juga bisa berdampak kurang baik. Begitu juga pembangunan yang dilakukan di Desa Pulau Terap, terdapat beberapa pembangunan yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dari pemerintah desa, pembangunan tersebut perlu dilakukan untuk pengembangan wilayah pemukiman masyarakat pada masa mendatang, agar masyarakat tidak menumpuk di satu titik pemukiman saja dan pemukiman masyarakat bisa menyebar di beberapa titik.

c. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian (*uncertainty*)

Keputusan dalam keadaan ketidakpastian muncul ketika keputusan tersebut belum pasti pelaksanaannya karena hal tersebut belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Seperti program pemerintah yang akan dilaksanakan di Desa Pulau Terap yaitu bantuan yang akan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu dan keadaan rumahnya rusak atau tidak layak huni. Pemerintahan desa sudah membahasnya dalam rapat dan menentukan siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut, ketua RT juga sudah mensurvei dan meminta warga yang menerima bantuan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan. Namun, sampai sekarang program tersebut belum terlaksana dan belum pasti kapan program tersebut akan dilaksanakan.

d. Keputusan dalam keadaan konflik (*conflict*)

Konflik sering kali terjadi dalam proses pengambilan keputusan di Desa Pulau Terap. Hal itu terjadi karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda yang sulit untuk disatukan. Biasanya konflik yang terjadi dalam menentukan tempat atau lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan terlebih dahulu. Selain itu juga konflik dapat terjadi dalam menentukan anggaran yang akan digunakan dan tenaga kerja yang akan melaksanakan pembangunan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perkataan pemimpin atau leader memiliki berbagai pengertian. Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi.

B. Keterlibatan Pemimpin Informal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pemimpin informal dijadikan penghubung dalam mengkomunikasikan berbagai program pembangunan pemerintah agar anggota komunitas yang bersangkutan dapat menerima. Namun celakanya, tidak semua program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Di sinilah terjadi benturan kepentingan antara berpihak kepada anggota kelompok yang telah memberikan kewenangan untuk memimpin atau berpihak kepada kepentingan pemerintah (penguasa) yang terkadang mengesampingkan kepentingan anggota kelompoknya. Tidak jarang pilihan jatuh pada pilihan yang ke dua karena mendapat tekanan dari pemerintah dan dicurigai macam-macam karena dianggap menghalang-halangi pembangunan/ kemauan pemerintah atau bahkan tergiur oleh iming-iming yang ditawarkan. Hal ini dapat terjadi karena meskipun telah diupayakan adanya pembangunan/ perencanaan pembangunan yang datangnya dari bawah (*bottom up*), namun dalam kenyataannya hal demikian masih belum optimal, sehingga masih saja dijumpai pelaksanaan pembangunan yang datangnya dari atas (*top down*) dari berbagai tingkatan.

Dalam penelitian ini pemimpin informal perlu untuk dapat merangkul para pemimpin-pemimpin informal lainnya sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi tinggi. Karena peran dari pemimpin informal itu sangat besar dalam mempengaruhi, memotivasi dan menginformasikan kepada masyarakat dalam hal berpartisipasi dalam pembangunan.

1. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat
2. Mengerahkan kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa

C. Keterlibatan Dalam Memetik Hasil dan Manfaat Pembangunan Secara Berkeadilan

Dalam proses, pembangunan diwilayah kecamatan, fungsi aparat pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan diwilayah ini. Fungsi ini sejalan dengan kedudukan aparat pemerintah kecamatan, dimana sedikit banyak usaha aparat

pemerintah untuk menggalang potensi pembangunan yang ada di kecamatan adalah tergantung pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh aparat kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa dari pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Terap melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama yang dipimpin oleh pemimpin informal. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu berupa partisipasi tenaga, ide-ide atau pemikiran, partisipasi dalam bentuk harta benda (uang), bahan-bahan material, dan partisipasi dalam bentuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat dikatakan tinggi tingkat partisipasinya, hal ini berdasarkan hasil penelitian kepada semua informan yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai peran pemimpin informal dalam pembangunan desa.

1. Peran pemimpin informal dalam pembangunan desa sangat penting ditengah-tengah masyarakat tapi belum terlalu efektif dalam hal menginformasikan dan mengajak kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan. Selain itu pemimpin informal seringkali menjadi donatur dalam setiap pembangunan yang ada di desa.
2. Untuk meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat perlu adanya sinerginitas antara pemimpin formal dan pemimpin informal

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengikutsertakan pemimpin informal dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan desa
2. Kepala desa perlu merangkul para pemimpin informal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Jakarta:.. Uhaendo dan Offset.
- Gulo, W . 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E, 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Khairuddin. 2002. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Malang: Averroes Press.
- Laswell Harold D. dan Kaplan, 2006. *Pengambilan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Sundar, 2007, *Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang*.
- Moeloeng, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suadji. A. 1999. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Karya Dharma.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Susantyo, Badrun.2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Pedesaan Telaahan dari Tulisan David C Korten Jurnal Informasi Vol.12 No.3*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI. Jakarta.
- Suzanne Keller. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal, Skripsi, Tesis.

- Barlan ZA. 2011. Pengaruh Pemimpin Lokal terhadap Keberhasilan Program

- Pembangunan. Skripsi. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Paolla. 2014. Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) Dalam Pembangunan Di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.